

**STRATEGI INDONESIA DALAM MENINGKATKAN EKSPOR IKAN TUNA
MELALUI KERJASAMA INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP
AGREEMENT**

(IJEPA)



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program
Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

oleh

HESTI HERMISA

4517023032

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Bosowa

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini :

Judul : Strategi Indonesia dalam Meningkatkan Ekspor Ikan Tuna melalui Kerjasama Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)

Nama Mahasiswa : Hesti Hermisa

Nomor Stambuk : 4517023032

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

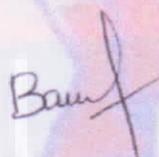
Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 18 Agustus 2022

Menyetujui ;

Pembimbing I

Pembimbing II

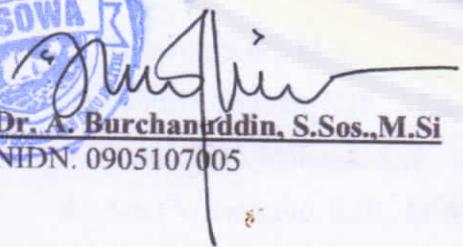

Beche Binti Mamma, S.IP., M.A.
NIDN. 0906128203

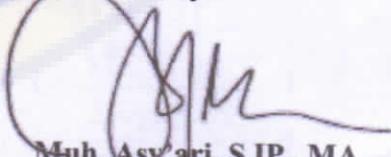

Arief Wicakcono, S.IP., M.A.
NIDN. 0927117602

Mengetahui,

Dekan FISIP
Universitas Bosowa Makassar

Ketua Jurusan Hubungan
Internasional


Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si
NIDN. 0905107005


Muh. Asy'ari, S.IP., MA
NIDN. 0908088806

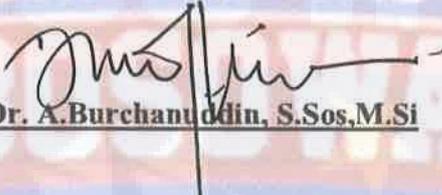
HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Tanggal 18 Bulan Agustus Tahun 2022 Dengan Judul Skripsi Strategi Indonesia dalam Mengekspor Ikan Tuna melalui Kerjasama Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)

Nama : Hesti Hermisa
Nomor Stambuk : 4517023032
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Sosiologi

Pengawas Umum:


Dr. A. Burchanuddin, S.Sos, M.Si

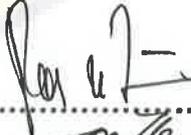
Panitia Ujian:


Beche Binti Mamma, S.IP., M.A.
Ketua


Arief Wicaksono, S.IP., M.A.
Sekretaris

Tim Penguji :

1. Rosnani, S.IP., M.A.
2. Zulkhair Burhan, S.IP., M.A.
3. Beche Binti Mamma, S.IP., M.A.
4. Arief Wicaksono, S.IP., M.A.


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah ini.

Nama : Hesti Hermisa

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Strategi Indonesia Dalam Meningkatkan Ekspor Ikan Tuna Melalui Kerja Sama Indonesia - Jepang Economic Partnership Agreement (IJEPA)

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri bukan dari orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya titik. Pendapat ahli, rujukan lain (penelitian sebelumnya, dan jurnal terdahulu) ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penulisan skripsi ini yang terbukti merupakan duplikat atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan sanksi hukum berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggung jawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Makassar, Agustus 2022

Penulis



Hesti Hermisa

4517023032

ABSTRAK

Jepang merupakan salah satu mitra dagang dalam kerjasama ekonomi yang penting terhadap Indonesia. Hal ini dibuktikan untuk mempereratnya kerjasama kemitraan tersebut dalam menghadapi era perdagangan serta pasar bebas. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang menyusun suatu perjanjian Bilateral yang dikenal sebagai Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement. Perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2007. Seiring pulihnya perekonomian global, sektor perikanan adalah salah satu sektor ekspor penyumbang devisa nasional. Meski pangsa ekspornya dari total ekspor nasional, nilai dan volume ekspornya cenderung naik. Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi dilihat dari ekspor suatu negara ke negara lain dalam bentuk barang dan jasa.. Dengan ditandatanganinya IJEPA ini juga dapat menjadi keuntungan khusus untuk sektor perikanan, yang paling utama adalah pemerintah melalui Departemen kelautan dan perikanan harus terus menyebarkan informasi tentang IJEPA.

Kata kunci: Kerjasama Internasional, Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dalam perdagangan ekspor ikan tuna.

ABSTRACT

Japan is one of the trading partners in important economic cooperation against Indonesia. This is proven to strengthen the partnership in facing the era of trade and free markets. The Government of Indonesia and the Government of Japan have drawn up a bilateral agreement known as the Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement. The agreement was signed on 20 August 2007. As the global economy recovers, the fishery sector is one of the export sectors that contributes to national foreign exchange. Although the export share of total national exports, the value and volume of exports tends to rise. One of the indicators of economic growth is seen from the exports of a country to other countries in the form of goods and services. The signing of the IJEPA can also be a special advantage for the fisheries sector, the most important thing is that the government through the Ministry of Marine Affairs and Fisheries must continue to disseminate information about IJEPA.

Keywords: International Cooperation, Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) in tuna export trade.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah Subhana Wa Ta'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul "*Strategi Indonesia dalam Meningkatkan Ekspor Ikan Tuna Melalui Kerjasama Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*". Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa, Makassar.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna baik dari metode penelitian hingga penulisan. Maka dari itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun sehingga kedepannya penulis dapat memperbaiki segala kekurangan.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini serta orang-orang yang ada dari awal hingga akhir perkuliahan penulis, yaitu kepada :

1. Kedua orang tua, Papa dan Mama yang selalu mendukung aktivitas baik dalam bentuk materi maupun moril dan tidak pernah membatasi keinginan penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini. Terima kasih yang sedalam- dalamnya telah mendengar keluh kesah dan selalu menguatkan penulis ketika down. Maaf belum bisa membalas apa yang Papa dan Mama berikan. Terima kasih juga kepada kedua adik saya yang selalu bertengkar. Jika tanpa kalian mungkin Rumah tidak akan seramai sekarang.
2. Nenek dan Ibu Muhria S.pd terimakasih untuk selalu mendoakan penulis agar diberikan kelancaran dan kemudahan disetiap Langkah penulis.

3. Ibu Beche Bt Mamma, S.Ip., M.A selaku pembimbing pertama dan Bapak Arief Wicaksono, S.Ip., M.A selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Tak lupa juga permohonan maaf yang sebesar- besarnya jika dalam proses pengerjaan skripsi ini terdapat kesalahan penulis baik yang disengaja maupun tidak disengaja.
4. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Bosowa Bapak Arief Wicaksono, S.Ip., M.A, Bapak Zulkhair Burhan S.Ip., M.A, Bapak Asy'ari Mukrim, S.Ip., M.A, Ibu Beche Bt Mamma, S.Ip., M.A, Ibu Fivi Elvira Basri, S.Ip., M.A serta Ibu Finaliyah Hasan, S.Ip., M.A yang telah berkenan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Staff fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yaitu Pak Budi yang telah membantu segala urusan administrasi penulis.
6. Teman-teman seangkatan dari AIROS dan PRAKSIS yang memberi semangat
7. Teman-teman kost pondok fififa yaitu: Narsiati, S.Kep, Werawati, S.pd, Ulfa dwiyanti, S.farm, Darmawati, S.Tr.par, Ruslita, S.pd yang telah banyak membantu dan mau mendengarkan keluh kesah penulis.
8. Terimakasih untuk Mazratul Isra, S.Tr.kes dan Narsiati, S.Kep, yang sudah setia menemani penulis selama menyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	4
1. Batasan Masalah	4
2. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Kegunaan Penelitian	4
D. Kerangka Konseptual	5
1. Konsep Kerjasama bilateral	5
2. Teori keunggulan komparatif	7
E. Metode Penelitian	9

A. Jenis Penelitian	9
B. Teknik Pengumpulan Data	10
C. Teknik Analisa Data	10
F. Rancangan Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Konsep Kerjasama Bilateral	13
B. Teori Keunggulan Komparatif	20
BAB III GAMBARAN UMUM	24
A. Dinamika Hubungan Indonesia dan Jepang dalam IJEPA	24
B. Perdagangan Internasional Indonesia-Japan	28
BAB IV PEMBAHASAN	36
A. Strategi Indonesia dalam Meningkatkan Ekspor Ikan Tuna ke Jepang selama kurun waktu 2015-2020	
B. Dampak Ekspor Tuna Indonesia terhadap Perekonomian Indonesia kurun waktu 2015- 2020	
BAB V KESIMPULAN	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	47
Daftar pustaka	48

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan yang luas dengan kekayaan sumber daya alam laut yang sangat melimpah. Hasil dari kekayaan alam tersebut dapat menjadi salah satu sumber pendapatan negara bagi pembangunan ekonomi, sehingga sebagian besar warga negaranya banyak yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut. Dilansir dari kompas.com, nelayan di Indonesia mencapai jumlah 2,17 juta. Maka dari itu, Indonesia harus memanfaatkan potensi yang dimilikinya sebaik mungkin agar dapat memajukan perekonomiannya, terutama sektor perikanan yang menjadi salah satu kekuatan utama Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia perlu melakukan pengelolaan yang baik dan benar secara internal maupun eksternal dengan bekerja sama dengan negara lain (Wedhaswary, 2014).

Dalam memenuhi kebutuhan negara akan sumber daya alam dan sumber daya manusia, mengingat Jepang hampir tidak memiliki sumber daya dalam negeri, Jepang telah menjalin kerjasama bilateral dengan negara-negara Asia, salah satunya dengan Indonesia. Sebagai kekuatan ekonomi dunia. Jepang merupakan salah satu negara yang tertarik dengan sumber daya alam laut yang ada di Indonesia, terutama ikan tuna yang menjadi bahan makanan utama dalam pembuatan sushi yang menjadi simbol makanan tradisi Jepang. Oleh karena kebutuhan Jepang akan impor sumber daya perikanan dari Indonesia. Pada tahun 2007 lalu Indonesia dan Jepang melakukan kerjasama ekonomi dalam rangka kerjasama Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) yang mulai berlaku efektif di tahun 2008. Dimana kerjasama ini sekiranya dapat menguntungkan di kedua belah pihak, yaitu Jepang terpenuhi kebutuhan akan ikan tunanya

dan Indonesia pun dapat menunjang pertumbuhannya dari hasil impor ikan tunanya ke Jepang (Dobson, 2001).

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang telah menandatangani perjanjian Bilateral yang dikenal sebagai Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Pada tanggal 20 Agustus 2007. Seiring pulihnya perekonomian global, sektor perikanan adalah salah satu sektor ekspor penyumbang devisa nasional. Meski pangsa ekspornya dari total ekspor nasional, nilai dan volume ekspornya cenderung naik. Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi dilihat dari ekspor suatu negara ke negara lain dalam bentuk barang dan jasa. Dengan ditandatanganinya IJEPA ini juga dapat menjadi keuntungan khusus untuk sektor perikanan, yang paling utama adalah pemerintah melalui Departemen kelautan dan perikanan harus terus menyebarkan informasi tentang IJEPA. Masyarakat Jepang mampu mengkonsumsi ikan hingga 86 kg per tahun. Data tersebut cukup membuktikan bahwa pasar ikan Jepang memiliki peluang baik bagi ikan-ikan impor Indonesia. Melalui IJEPA diharapkan dapat mempermudah akses pasar Indonesia untuk masuk ke pasar Jepang dengan mudah dan dapat menempatkan produk perikanan Indonesia lebih baik dibandingkan produk-produk negara lain (SINDO, 2015).

Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Jepang telah berlangsung selama kurang lebih 63 tahun didasarkan pada perjanjian Perdamaian antar republik Indonesia dengan Jepang bulan Januari 1958. diadakannya Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) tidak lain dan tidak bukan yakni bertujuan untuk pemenuhan pada kebutuhan masing-masing negara. Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement (IJEPA) merupakan perjanjian bilateral di bidang ekonomi Indonesia-Jepang, yang bertujuan untuk meningkatkan impor dan ekspor serta investasi antara kedua negara. Kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan manfaat yang adil dan seimbang bagi kedua negara melalui liberalisasi pasar, fasilitasi dan kerja sama

peningkatan kapasitas. Tujuan penerapan IJEPA adalah untuk memperkuat kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Jepang, khususnya dalam hal perdagangan dan investasi. Kegiatan ekspor ikan adalah salah satu hal yang dilakukan Indonesia dalam bidang kelautan (Nelly Yuswarni,2012).

Disamping itu juga meneliti sejauh mana perkembangan setelah dilaksanakannya kerjasama Indonesia-Jepang dalam hal perdagangan ekspor hasil laut dengan adanya Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), yang mana pada dasarnya kerjasama ini dibentuk untuk kepentingan nasional kedua belah pihak dalam pemenuhan dari masing-masing negara, baik dari Indonesia dalam mengelola sumber daya alam baharinya yakni komoditas ikan tuna, dan dari jepang sebagai pemenuhan dalam konsumsi ikan masyarakatnya.

Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) di dalam perdagangan ekspor ikan tuna menguraikan bagaimana strategi Indonesia. Disamping itu juga meneliti sejauh mana perkembangan setelah dilaksanakannya kerjasama Indonesia-Jepang dalam hal perdagangan ekspor hasil laut dengan adanya Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), yang mana pada dasarnya kerjasama ini dibentuk untuk kepentingan nasional kedua belah pihak dalam pemenuhan dari masing-masing negara, baik dari Indonesia dalam mengelola sumber daya alam baharinya yakni komoditas ikan tuna, dan dari jepang sebagai pemenuhan dalam konsumsi ikan masyarakatnya (Larasati, 2015).

Maka dari itu, kehadiran kerjasama Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) yang mulai diberlakukan sejak tahun 2008 sebagai institusi Indonesia dalam menentukan strategi kebijakan untuk menghilangkan hambatan tarif maupun non-tarif untuk

produk komoditas perikanan ikan tuna diharapkan mampu menguatkan daya saing komoditas ikan tuna dan mendongkrak kinerja ekspor ikan tuna ke pasar Jepang.

B. Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi permasalahan dalam kerjasama Indonesia- Jepang melalui Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) pada perdagangan ekspor ikan tuna 2015-2020.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yaitu;

- a. Bagaimana strategi pemerintah Republik Indonesia dalam meningkatkan ekspor tuna melalui kerjasama IJEPA ke Jepang tahun 2015-2020.

C. Kegunaan dan tujuan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan strategi Pemerintah Republik Indonesia dalam meningkatkan ekspor tuna melalui kerjasama IJEPA ke Jepang tahun 2015-2020.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan dampak ekspor Tuna Indonesia terhadap perekonomian Indonesia tahun 2015-2020.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai masukan atau referensi bagi pembaca atau peneliti agar mengetahui gambaran umum mengenai strategi Indonesia dalam meningkatkan ikan tuna ke Jepang.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan melatih cara berpikir, memahami serta mengamati mengenai realitas hubungan internasional khususnya mengenai hubungan Internasional.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan pembandingan bagi studi-studi lainnya yang berkaitan dengan masalah-masalah terkait, sebagai literatur tambahan dalam mempelajari dan menganalisa masalah-masalah Hubungan internasional

D. Kerangka konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis ingin menunjukkan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement dan strategi indonesia mengespor ikan tuna memiliki keterkaitan. Kerangka konsep yang digunakan dalam menganalisa masalah diatas adalah konsep kerjasama Bilateral dan Teori Keuntungan Komparatif

1. Konsep kerjasama Bilateral

Kerjasama Bilateral merupakan bagian dari kerjasama ekonomi Internasional yang mencakup dua negara, Kerjasama Bilateral ialah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak atau dua negara atau dengan kata lain hubungan yang saling mempengaruhi antara dua pihak. Kerjasama ini biasanya diwujudkan dalam berbagai bentuk; baik perdagangan, diplomatik, kebudayaan dan juga pendidikan (Didi Krisna, 1993).

Adapun menurut Holsty dan Azhary tentang variabel-variabel yang harus diperhitungkan dalam kerjasama bilateral adalah:

1. Kualitas dan kuantitas kapabilitas yang dimiliki suatu negara.
2. Keterampilan mengerahkan kapabilitas tersebut untuk mendukung berbagai tujuan.
3. Kredibilitas ancaman serta gangguan.
4. Derajat kebutuhan dan ketergantungan.
5. Responsivitas di kalangan pembuat keputusan (Rosyadi).

Hubungan bilateral sendiri menggambarkan keadaan atau hubungan timbal balik antar dua pihak, dalam hal ini negara. (Perwita dan Yani, 2005:28). Proses dalam hubungan bilateral dijalankan berdasarkan 3 alasan utama, yaitu:

1. Menjalankan kepentingan nasional
2. Memelihara perdamaian
3. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

IJEPA adalah bentuk perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Jepang yang ditandatangani dan di bentuk pada tanggal 20 Agustus 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Shinjo Abe. IJEPA mulai aktif diimplementasikan pada 1 Juli 2008. Kerjasama Bilateral antara dua negara memiliki prinsip yang saling menguntungkan, saling menghargai, dan saling menghormati satu dengan yang lain dalam rangka pengembalian kesepakatan dan keputusan. Kesepakatan ini merupakan perjanjian perdagangan bebas bilateral pertama yang dilakukan Indonesia, dan yang paling komprehensif. Dalam program Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) hubungan bilateral kedua negara semakin baik dengan dilakukannya perdagangan ekspor ikan tuna. Dengan adanya kerjasama bilateral menjadi salah

satu cara agar sering berinteraksi yakni dengan menjaga kerjasama atau meningkatkan kerjasama.

2. Teori Keunggulan Komparatif (Theory of Comparative Advantage)

Dalam Keunggulan Komparatif menurut David Ricardo, dua negara akan melakukan perdagangan apabila perdagangan tersebut dapat menguntungkan kedua belah pihak. Keuntungan kepada kedua belah pihak dapat dilihat dari daya tukar domestik negara tersebut. Apabila suatu negara dapat menghasilkan suatu komoditas dengan harga yang sama, dibandingkan dengan membeli dari negara lain maka perdagangan antara dua negara tidak akan terjadi. Lain halnya jika negara tersebut membeli suatu komoditas dari negara lain lebih murah dari pada memproduksi sendiri komoditas tersebut, maka perdagangan antara dua negara akan terjadi. Dengan catatan, negara yang menjual komoditas mendapatkan keuntungan dari jual beli tersebut. Salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui keunggulan komparatif suatu negara adalah metode Revealed Comparative Advantage (RCA) (Saidy 2013).

Secara umum David Ricardo mendasarkan teorinya pada sejumlah asumsi yang disederhanakan, yaitu:

1. Hanya terdapat dua negara dan dua barang.
2. Perdagangan bersifat bebas.
3. Terdapat mobilitas tenaga kerja yang sempurna di dalam negara namun tidak ada mobilitas antara dua negara.
4. Biaya produk konstan.
5. Tidak ada biaya transportasi.
6. Tidak ada perubahan teknologi.

Teori keunggulan komparatif telah menjadi dasar bagi teori perdagangan internasional. Penekanan utamanya adalah pada keunggulan komparatif absolut dan relatif dalam produksi komoditas dibandingkan dengan negara lain. Proses ekspor dilakukan oleh negara terhadap komoditas dengan keunggulan komparatif yang tinggi. Komoditas dengan keunggulan komparatif yang rendah diperoleh melalui impor. Perdagangan internasional dengan model perdagangan bebas akan membuat sumber daya yang langka dapat dimanfaatkan secara tepat guna. Setiap negara juga dapat melakukan perdagangan sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimilikinya pada bagian spesifikasi produksi (Yusdja 2004).

Teori perdagangan internasional diasumsikan oleh David Ricardo ibarat dua negara yang sama-sama memiliki faktor produksi tetapi memiliki perbedaan dalam perbandingan harga (harga komparatif). Meskipun sama-sama tidak memiliki keunggulan mutlak atas suatu komoditas satu sama lain, perdagangan internasional masih dapat terjadi antar kedua negara selama keduanya memiliki prinsip untuk mengutamakan impor produk komoditas yang memiliki faktor produksi lebih besar untuk efisiensi biaya dan jam kerja. Ricardo beranggapan jika sebuah negara berfokus kepada keunggulan komparatif dari produk yang mereka miliki dan mengimpor komoditas yang memiliki kerugian komparatif maka perdagangan internasional akan menguntungkan kedua negara tersebut karena adanya bentuk interdependensi dari keduanya.

Dalam teori nya, David Ricardo memberlakukan beberapa asumsi, yaitu:

1. Hanya terdapat dua negara dan dua komoditi (bilateral).
2. Terdapat perdagangan bebas (Free Trade Area).
3. Adanya mobilitas tenaga kerja yang sempurna (perfect mobility), biaya produksi konstan, tidak ada biaya transportasi.

4. Teknologi tetap.
5. Penerapan teori tenaga kerja (Labor Theory) teori ini menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan barang tertentu.

Adapun hipotesa penulis adalah dengan adanya kerjasama Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) yang mengekspor ikan tuna ini meningkatkan keuntungan komparatif sehingga kedua negara berupaya meningkatkan kerjasama di bidang kelautan agar kepentingan masing-masing dapat terpenuhi.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dimana penulis mencari dan mencoba menggambarkan penyebab terjadinya suatu fenomena. Fenomena yang diteliti subjektif berdasarkan sudut pandang analisa yang digunakan oleh peneliti. Hasil akhir menggambarkan sebab akibat antara kedua variabel penelitian. Dimana penulis akan menjelaskan strategi Pemerintah Republik Indonesia dalam meningkatkan ekspor Tuna melalui kerjasama Indonesia Japan Economic Partnership Agreement sejak tahun 2015-2020.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi literatur seperti buku, jurnal, artikel, situs internet resmi, serta laporan. Adapun, data yang dibutuhkan ialah data yang berkaitan langsung dengan penelitian Penulis yaitu, strategi Pemerintah Republik Indonesia dalam meningkatkan ekspor Tuna melalui kerjasama Indonesia Japan Economic Partnership Agreement sejak tahun 2015-2020.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik analisis yang akan digunakan oleh penulis adalah Telaah Pustaka (library research) dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta dan kemudian dikorelasikan dengan data yang lain sehingga bisa ditarik sebuah kesimpulan. Teknik analisis yang dilakukan secara kualitatif ini juga memiliki tujuan untuk memberi penjelasan secara sistematis, faktual telaah untuk mendalami studi permasalahan yang akan dijawab

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang akan digunakan oleh penulis adalah analisis data kualitatif dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta dan kemudian dikorelasikan dengan data yang lain sehingga bisa ditarik sebuah kesimpulan. Teknik analisis yang dilakukan secara kualitatif ini juga memiliki tujuan untuk memberi penjelasan secara sistematis, faktual telaah untuk mendalami studi permasalahan yang akan dijawab.

F. Rancangan Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi dalam (5) bab, sebagai berikut, pada bab pertama pada bab pertama penulis akan memaparkan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta sistematika pembahasan; pada bab kedua penulis akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang berisi konsep dan teori yang digunakan penulis. Pada bab ketiga akan berbicara tentang gambaran umum yang berisi kerjasama kedua negara dan proses pelaksanaan program tersebut serta promosi pariwisata budaya yang dilakukan selama kegiatan berjalan. Apakah strategi yang ada mempengaruhi kerjasama kedua negara terus

dilaksanakan dari tahun ketahun.; Dan bab terakhir yaitu bab keempat akan meberikan kesimpulan tentang aanlisa temuan dan data dari bacaan tersebut. dan bab lima (5) memberikan kesimpulan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) di dalam perdagangan ekspor ikan tuna (2012-2017) menguraikan bagaimana upaya dan langkah yang diambil. Kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan manfaat yang adil dan seimbang bagi kedua negara melalui liberalisasi pasar, fasilitasi dan peningkatan kerja sama peningkatan kapasitas. Kegiatan ekspor ikan adalah salah satu hal yang dilakukan Indonesia dalam bidang kelautan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan negara akan sumber daya alam dan sumber daya manusia, mengingat Jepang hampir tidak memiliki sumber daya dalam negeri, Jepang telah menjalin kerjasama bilateral dengan negara-negara Asia, salah satunya dengan Indonesia, Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) di dalam perdagangan ekspor ikan tuna menguraikan bagaimana strategi Indonesia. Disamping itu juga meneliti sejauh mana perkembangan setelah dilaksanakannya kerjasama Indonesia-Jepang dalam hal perdagangan ekspor hasil laut dengan adanya Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), yang mana pada dasarnya kerjasama ini dibentuk untuk kepentingan nasional kedua belah pihak dalam pemenuhan dari masing-masing negara, baik dari Indonesia dalam mengelola sumber daya alam baharinya yakni komoditas ikan tuna, dan dari Jepang sebagai pemenuhan dalam konsumsi ikan masyarakatnya. Dalam menjelaskan kerjasama Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) ini sebagai salah satu cara untuk meningkatkan hubungan kedua negara maka membutuhkan konseptual yang dapat menjelaskan bagaimana kerjasama ini dapat mempengaruhi hubungan kedua negara sehingga terjadi interdependensi kerjasama dan meningkatnya kerjasama di bidang perdagangan Internasional.

A. Konsep Kerjasama Bilateral

Hubungan bilateral merupakan keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara dua pihak yang terlibat, juga meliputi adanya aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral ini “negara” (state actor).

Konsep kerjasama bilateral yang dilakukan antara negara menjadi hal yang sangat penting dalam studi hubungan internasional. Kerjasama bilateral merupakan hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara dalam berbagai aspek kehidupan guna tercapainya tujuan bersama. Kerjasama bilateral dapat berbentuk kerjasama diplomatik yang di tandai dengan hubungan erat antara lembaga-lembaga antara negara. Menurut S. Kraus dan T.J Pempel, kerjasama bilateral yang merupakan suatu hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara mengacu pada hubungan dalam beberapa aspek salah satunya satunya pada bidang lingkungan (Rosyadi).

Komplek permasalahan yang terjadi di berbagi belahan dunia dan tidak dapat diselesaikan sendiri dapat menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi terbentuk kerjasama bilateral. Tentunya hal ini ditujukan untuk mencapai solusi dari permasalahan yang terjadi di negara tersebut. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, salah satu aspek yang dapat memicu terjadinya kerjasama bilateral adalah aspek lingkungan. Hal ini dikarenakan permasalahan lingkungan telah menjadi sorotan dunia internasional dan diperlukan upaya dari berbagai pihak untuk menanganinya. Permasalahan lingkungan awalnya mungkin hanya berajak dari regional namun dampak yang dihasilkan kadang mampu merambah tinggi level internasional. Hal inilah yang kemudian akan mempengaruhi kesadaran negara-negara lain untuk mengatasi masalah ini dengan menjalin kersama antara negara atau kerjasama bilateral (Rosyadi).

Menurut Kusumohamidjojo, kerjasama bilateral adalah suatu bentuk kerjasama adalah suatu bentuk kerjasama diantara negara-negara yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh diseborang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik kebudayaan dan struktur ekonomi.

Konsep kerjasama bilateral dalam konteks ekonomi merepresentasikan hubungan antara aktor yang memiliki kepentingan berbeda, namun untuk tujuan memperoleh hasil yang bersifat mutual dan menguntungkan kedua, yang lebih baik daripada jumlah yang tunggal, melalui pencapaian, melalui banyak upaya dan berdasarkan kontrak, dari kegiatan yang terkait dengannya (di bidang produksi, penelitian, transfer teknologi, perdagangan dan jasa). Selain itu, kerja sama ekonomi bilateral menurut Smith memfasilitasi pengurangan konflik dan penciptaan lingkungan yang stabil dengan secara tidak langsung meningkatkan rekonsiliasi politik, stabilitas dan kerja sama (Frank, Flo dan Anne Smith. 2002).

Istilah hubungan internasional akan berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi di antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Pengkajian hubungan internasional, termasuk didalamnya pengkajian terhadap politik luar negeri atau politik internasional, dan meliputi segala segi hubungan di antara berbagai negara di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, Palang Merah Internasional, pariwisata, perdagangan internasional, transportasi, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional (Holsti, 1987).

Definisi kerjasama menurut Holsti dapat dibagi menjadi lima, yaitu:

1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan nilai atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau di penuhi oleh semua pihak.
2. Persetujuan atas masalah tertentu antar dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan benturan kepentingan.
3. Pandangan atau harapan suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan tujuan.
5. Transaksi antara negara untuk memenuhi persetujuan mereka.
(Holsti,1987:652-653).

Hakekat dari pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan oleh setiap negara memiliki sifat universal guna membentuk suatu keadaan yang mampu menghindari berbagai permasalahan dan konflik yang bersifat internasional. Bentuk interaksi kerjasama dapat dibedakan berdasarkan pihak yang melakukan hubungan antara negara, seperti kerjasama bilateral, trilateral, regional, dan multilateral.

Hubungan bilateral merupakan keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang terlibat, dan aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral itu adalah negara (Perwita dan Yani, 2005:28).

Dalam proses Hubungan bilateral di tentukan tiga motif, yaitu:

- Memelihara kepentingan nasional

- Memelihara perdamaian
- Meningkatkan kesejahteraan ekonomi (Perwita dan Yani, 2005:29).

Seperti yang dilakukan Indonesia dan Japan yang melakukan kerjasama ekonomi dalam kerjasama Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) pada tahun 2008, yang dimana kerjasama ini saling menguntungkan kedua belah pihak negara, yaitu Jepang terpenuhi kebutuhan akan ikan tunanya dan Indonesia pun dapat menunjang ekonominya dari hasil impor ikan tunanya ke Jepang.

Salah satu wujud interaksi negara dalam sebuah sistem internasional adalah kerjasama. Secara umum, bentuk kerjasama negara dibagi menjadi dua, yaitu bilateral ketika melibatkan dua negara, dan multilateral ketika melibatkan lebih dari dua negara. Dalam kerjasama bilateral, ada basis prinsip utama yang menjadi dasar negara mau melakukan kerjasama bilateral tersebut, dan ini disebut dengan istilah bilateral cooperation theory atau teori kerjasama bilateral (Drs Supendi Haryadhi. 1990.)

Kerjasama dibuat atau dilakukan untuk mengurangi kerugian negative yang disebabkan oleh tindakan oleh individual negara diaman memberi dampak terhadap negara-negara lainnya (Holsti,1995;360-363).

Kerjasama Ekonomi Internasional didefinisikan oleh Gabriel Ciprian Andrusac dalam karyanya *Theoretical Perspectives on Economic Cooperation* sebagai kerjasama antara dua atau lebih negara yang berkaitan dengan pertukaran modal, barang, dan jasa melintasi perbatasan atau wilayah internasional, dalam kerjasama ekonomi internasional Di sebagian besar negara, perdagangan tersebut merupakan bagian signifikan dari produk domestik bruto (PDB). Faktor-faktor seperti ekonomi, kebijakan pemerintah, pasar, hukum, sistem peradilan, mata uang, dll.

mempengaruhi jalannya kerjasama tersebut. Hubungan politik antara dua negara juga mempengaruhi perdagangan di antara mereka (Andruseac, Gabriel,Iulian2015).

Kerjasama internasional menurut Coplin dan Marbun “kerjasama awalnya terbentuk dari satu alasan dimana negara ingin melakukan interaksi rutin yang baru dan lebih baik bagi tujuan bersama, interaksi-interaksi ini sebagai aktifitas pemecahan masalah secara kolektif, yang berlangsung baik secara bilateral maupun secara multilateral (Coplin dan Marbun,2003;282).

Kerjasama Internasional didalamnya bertemu berbagai macam kepentingan nasional oleh negara-negara dan bangsa yang dimana kepentingan tersebut tidak dapat di penuhi oleh negerinya sendiri tanpa bantuan negara lain.

Menurut Doughety dan Graff isu utama dari kerjasama internasional yaitu:

Didasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang didapat melalui kerjasama bisa mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama Internasional bisa terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup , dan pertahanan keamanan. Berbagai masalah tersebut membuat negara-negara yang ada di dunia untuk membentuk suatu kerjasama internasional. (Douhety & Graff,1997;419)

Kerjasama bisa berlangsung dalam berbagai konsep yang berbeda-beda tapi kebanyakan dari kerjasama dan interaksi yang dijalin karena memiliki kepentingan dan masalah yang serupa oleh kedua pihak atau pemerintah. Beberapa organisasi internasional seperti PBB menetapkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh negara dengan negara lain adalah salah satu bentuk pengakuan kedaulatan oleh negara lain. Kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak

negara dalam rangka untuk melakukan perundingan atau pemecahan masalah bersama dengan kerjasama belatera. Kerjasama bilateral adalah bentuk kerjasama yang melakukan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak atau negara. Seperti halnya dalam kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Jepang dalam Indonesia Japan Economic Partnership Agreement kedua negara saling berinteraksi dalam bidang perdagangan internasional.

Indonesia memulai hubungan luar negeri dengan negara-negara luar negeri lain dimulai sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia telah melakukan kerjasama bilateral maupun multilateral dengan negara-negara sahabat, namun dalam melakukan kerjasama Indonesia tetap mengedepankan dan memperlihatkan bentuk kehidupan masyarakat yang mana menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati, tidak ikut campur dalam urusan negara lain, menolak dan menggunakan kekerasan, konsultasi dan mengutamakan konsensus dalam mengambil keputusan. Indonesia sudah melakukan kerjasama bilateral dengan 162 negara-negara dan satu teritori khusus yang berupa non-self governing territory. (KEMENLU, 2019)

Hubungan bilateral dapat terselenggara akibat adanya kesepahaman antara kedua negara yang sama-sama memiliki kepentingan nasional dalam usaha untuk melakukan politik luar negeri hubungan bilateral yang dilakukan oleh sebuah negara dapat dilihat dengan kepentingan nasional yang dirumuskan. yang mana seperti yang dikemukakan oleh Plano dan Olton :

Hubungan kerjasama yang terjadi antara dua negara di dunia ini pada dasarnya tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara. Kepentingan nasional merupakan sesuatu yang sangat vital yang mencakup kelangsungan hidup bangsa dan

negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan , militer , dan kesejahteraan ekonomi (Plano,2000:7)

Dengan dilakukannya kerjasama Indonesia dan Jepang dalam program Indonesia Japan Economic Partnertship Agreement (IJEPA) dapat dilihat bahwa kedua negara memiliki keinginan untuk mewujudkan kepentingan nasional masing-masing negara. Kedua negara terus melakukan kerjasama ini untuk memenuhi kepentingan nasional tersebut.

Menurut T. May. Rudy setelah kerjasama yang terbentuk dari berbagai komitmen individu untuk mendapatkan kesejahteraan secara kolektif yang merupakan hasil dari adanya persamaan kepentingan (Rudy, 2005:5).

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat, bahwa “Politik Luar Negeri pada hakikatnya adalah alat negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kebijakan luar negeri merupakan aspek cita-cita suatu bangsa dan oleh karenanya politik luar negeri merupakan aspek pula dari strategi nasional beserta jangka pendek dan jangka panjang” (Kusumaatmadja, 1983).

Sedangkan Kebijakan Luar Negeri itu sendiri, sebagaimana diungkapkan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton dalam bukunya *The International Relations*, yaitu “*Foreign policy is strategy of plan course of action developed by decision makers of a state or international entities aimed at achieving specific goals defined intern of national interest*” (Olton, 1982).

Dalam melakukan hubungan internasional terdapat beberapa interaksi antar negara-negara, interaksi tersebut dapat berbentuk perang, konflik, kerjasama dalam organisasi internasional (Mas’oed, 1990). Pasca Perang Dingin, hubungan antar negara lebih erat dengan banyaknya negara yang melakukan hubungan internasional melalui kerjasama internasional.

B. Teori Keunggulan Komparatif

Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo, dalam teori ini didasarkan pada nilai tenaga kerja atau theory of labor value yang menyatakan bahwa nilai atau harga suatu cost comparative produk ditentukan oleh jumlah waktu atau jam kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Setiap negara mengkhususkan faktor produksinya dalam bidang-bidang yang diunggulinya secara komparatif dan semua negara melakukan perdagangan secara bebas tanpa hambatan, maka akan tercapainya efisiensi dalam penggunaan faktor-faktor produksi dan pada gilirannya produksi dunia secara keseluruhan akan mencapai maksimum, sehingga semakin tinggi kemakmurannya, (Apridar 2012)

Teori keunggulan komparatif Ricardo disempurnakan oleh G. Haberler yang menafsirkan bahwa labor of value hanya digunakan untuk barang antara, sehingga menurut G. Haberler teori biaya imbalan (theory opportunity cost) dipandang lebih relevan. Argumentasi dasarnya adalah bahwa harga relatif dari komoditas yang berbeda ditentukan oleh perbedaan biaya. Biaya disini menunjukkan produksi komoditas alternatif yang harus dikorbankan untuk menghasilkan komoditas yang bersangkutan. Selanjutnya, teori Heckscher Ohlin tentang pola perdagangan menyatakan bahwa:

Komoditas-komoditas yang dalam produksinya memerlukan faktor produksi (yang melimpah) dan faktor produksi (yang langka) di ekspor untuk ditukar dengan barang-barang yang membutuhkan faktor produksi dalam proporsi yang sebaliknya. Jadi secara tidak langsung faktor produksi yang melimpah di ekspor dan faktor yang langka di impor (Ohlin, 1933, hal.92 dalam Lindert dan Kindleberger, 1993).

Keunggulan komparatif merupakan suatu ukuran daya saing (keunggulan) potensial dalam artian daya saing yang akan dicapai apabila perekonomian tidak mengalami distorsi sama sekali. Komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dikatakan juga memiliki efisiensi secara ekonomi.

Berakar dari aliran yang sama, David Ricardo dalam bukunya *On The Principles of Political Economy and Taxation* juga menjelaskan mengenai perdagangan internasional melalui teori keunggulan komparatif (*comparative advantage*). Teori keunggulan komparatif adalah teori perdagangan internasional dimana dua negara atau lebih melakukan perdagangan dengan mengekspor produk yang menjadi keunggulan komparatifnya. Lebih jauh, teori ini juga menjelaskan mengenai bagaimana sebuah negara, yang walaupun tidak dapat memproduksi komoditas jauh lebih efektif dan efisien dari segi biaya dan waktu daripada negara lainnya (keunggulan mutlak), tetap dapat melakukan transaksi perdagangan dengan negara mitranya dengan cara melakukan spesialisasi produksi komoditas. Kemampuan memproduksi komoditas tersebut tidak terlepas dari faktor sumberdaya alam dan sumberdaya manusianya. Sebuah negara yang memiliki keunggulan mutlak pun tetap memerlukan spesialisasi produksi untuk dapat melakukan perdagangan internasional.

Ada beberapa kritik terhadap asumsi teori keunggulan komparatif model David Ricardo:

1. Proses produksi dan perdagangan belum tentu hanya melibatkan dua jenis barang dari dua negara. Asumsi ini terpatahkan karena pada kenyataannya ekspor dan impor melibatkan banyak barang dan negara sekaligus.

2. Perdagangan antarnegara tidak mungkin diasumsikan tanpa biaya transportasi. Biaya transportasi dapat berpengaruh ke harga jual, sehingga menghilangkan keunggulan yang sebelumnya hadir dari biaya peluang.
3. Ada lebih banyak faktor produksi yang terlibat daripada sekadar tenaga kerja. Misalnya modal, SDA, dan kewirausahaan turut diperhitungkan. Modal dalam bentuk mesin, misalnya, dapat membuat produksi lebih cepat dan dengan demikian lebih menguntungkan.
4. Tenaga kerja belum tentu selalu mobile. Mereka memerlukan waktu untuk mencari pekerjaan baru saat beralih ke industri lain. Selain itu, di era globalisasi tenaga kerja dapat berpindah ke negara lain dengan mudah untuk mencari penghidupan yang lebih baik.

Perbedaan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh suatu negara ditentukan oleh faktor keunggulan suatu negara dibandingkan negara lainnya. Dua faktor keunggulan yang umum yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Negara dengan keunggulan sumber daya alam akan memiliki keunggulan komparatif pada produk primer dan produk padat sumber daya alam. Sedangkan negara dengan keunggulan komparatif sumber daya manusia akan memiliki keunggulan dalam produk padat teknologi dan produk padat modal sumber daya manusia. Pola keunggulan komparatif yang menyebar antarnegara anggota perdagangan akan memperbesar peluang perdagangan bebas. Sebaliknya, pola keunggulan komparatif yang serupa antarnegara anggota akan memperbesar peluang terjadinya hambatan dalam perdagangan.

Teori ini berpengaruh besar terhadap negara-negara yang ingin menjalankan perdagangan internasional. Mereka disarankan melakukan spesialisasi dan ekspor produk dengan keunggulan

komparatif. Sementara itu produk yang tidak mempunyai keunggulan komparatif sebaiknya diimpor saja supaya tidak berpengaruh ke inflasi. Kemampuan negara memproduksi barang dengan keunggulan komparatif sangat penting agar mampu meraih keberhasilan ekspor. Keunggulan komparatif adalah kondisi di mana negara mempunyai keunggulan terhadap suatu produk dibandingkan negara kompetitor. Sementara itu dalam keadaan yang sama negara lain tidak terlalu unggul dalam menghasilkan barang tersebut.



BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Dinamika Hubungan Indonesia dan Jepang dalam IJEPA

Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) ditandatangani oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada tanggal 20 Agustus 2007 dan mulai berlaku efektif sejak 1 Juli 2008. Dengan adanya penurunan tarif melalui IJEPA, maka kesepakatan ini merupakan perjanjian perdagangan bebas bilateral pertama yang dilakukan Indonesia, dan yang paling komprehensif.

Indonesia dan Jepang membentuk sebuah organisasi yang bernama Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Organisasi ini adalah sebuah organisasi internasional yang menandatangani sebuah perjanjian bilateral dalam bidang perdagangan dan ekonomi antar kedua negara pada tanggal 20 Agustus 2007 yang disebut dengan *agreement between the republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership Agreement* lalu, perjanjian tersebut ditindaklanjuti pada tanggal 19 Mei 2008 oleh Presiden Republik Indonesia yang menerbitkan sebuah peraturan Presiden (Perpres) nomor 36 tahun 2008 yang meratifikasi perjanjian tersebut untuk menjadi bagian dari peraturan perundangan di Indonesia. Naskah perjanjian itu sendiri ditulis dalam bahasa Inggris karena melibatkan dua negara yang mempunyai perbedaan bahasa, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa masing-masing negara. Berdasarkan pasal dalam perpres tersebut, apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dalam berbagai persetujuan yang ditandatangani maupun

pertukaran nota oleh kedua pemerintah untuk memberikan landasan lebih kuat bagi kerjasama di berbagai bidang. Intensitas kunjungan timbal balik di antara pemimpin dan pejabat tinggi kedua negara cukup tinggi.

IJEPA bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi Indonesia dan Jepang, serta pasar regional melalui 3 pilar utama yaitu:

1. Liberalisme perdagangan IJEPA.

Menghapuskan atau mengurangi hambatan perdagangan (bea masuk) dan investasi (perbaikan dan kepastian hukum)

2. Fasilitasi Perdagangan IJEPA.

Kerjasama standarisasi, bea cukai, pelabuhan dan jasa perdagangan. Selain itu, IJEPA juga mengatur perbaikan iklim investasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan Investor atau pebisnis Jepang untuk berinvestasi di Indonesia.

3. Capacity Building IJEPA.

Memberikan ruang bagi kedua pihak untuk melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan daya saing produsen Indonesia (ditjenppi.kemendag.go.id).

Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) merupakan bentuk kerjasama ekonomi bilateral antara Indonesia dan Jepang yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan impor, ekspor dan investasi di kedua negara. Kerangka perjanjian ini meliputi liberalisasi perdagangan, investasi, perlindungan, anti-persaingan, memperdalam kerja sama, dan menetapkan produser untuk menegakkan perjanjian. Perjanjian ini terjalin dilandasi oleh kepentingan nasional masing-masing negara. Adapun kepentingan nasional Indonesia dalam perjanjian ini antara lain mengoptimalkan kerjasama antara Indonesia-Jepang, mendapat

kepastian akses pasar di Jepang yang lebih luas berkat penurunan tarif, meningkatkan arus barang dan jasa, mendapatkan transfer teknologi, sebagai sektor penggerak, program kesejahteraan, dan juga menjadi pusat pengembangan manufaktur.

Eksplorasi ikan tuna merupakan salah satu permasalahan yang timbul dari berlakunya kerjasama IJEPA. Namun, masih ada beberapa masalah lain yang mendorong agar kebijakan ini segera di evaluasi. Masalah-masalah tersebut di antara lain mengenai timpangnya perdagangan antara Indonesia dan Jepang, standarisasi produk barang atau jasa yang masuk ke Jepang cukup sulit, terjadinya krisis di berbagai bidang, dan jadwal penurunan tarif yang tidak tetap waktu. Yang mana masalah-masalah ini kemudian berdampak pada dinamika hubungan Indonesia dan Jepang. Namun dinamika di antara kedua negara ini tidak begitu signifikan dikarenakan politik luar negeri pada saat itu, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu *million friends zero enemy* cenderung lemah. *Ecological modernization* yang ditawarkan oleh perspektif *green politics* dapat menjelaskan bagaimana posisi Indonesia dalam hal pembangunan ekonomi dan politik yang dilakukannya dengan Jepang. Model ini memiliki dua versi, yaitu *weak ecological modernization* dan *strong ecological modernization*. Kedua versi ini memiliki karakteristik yang berbeda (Nye 2004).

Weak Ecological Modernization Strong Ecological Modernization

Technological solutions to environmental problems	Broad changes to institutional and economic structure of society incorporating ecological concerns
---	--

Technocratic/corporatism styles of policy making by scientific, economic and political elites	Open, democratic decision making with participation and involvement
Imposes a single, closed-end framework on political and economic development	Concerned with the international dimensions of the environment and development

Dilihat dari kedua karakteristik diatas, Indonesia tergolong pada *Weak Ecological Modernization*. Dimana Indonesia berusaha melibatkan publik dan kontrol demokratis dalam perkembangan ekonomi dan politik. Berbeda dengan Jepang yang bisa dikatakan berada pada posisi tengah antara kedua karakteristik tersebut, namun cenderung tergolong *Weak Ecological Moderzation*. Hal ini di karenakan jepang mengedepankan solusi teknologi untuk masalah lingkungan, melibatkan negara-negara maju, tetapi juga melibatkan pengawasan publik mengingat Jepang juga termasuk negara demokrasi.

Indonesia yang tergolong *strong ecological modernization* inilah yang membuat Indonesia dimanfaatkan oleh Jepang. Dengan terbukanya pasar bebas antar kedua negara, tentu saja pertukaran teknologi juga akan semakin mudah. Hal ini menjadi ketertarikan sendiri bagi Indonesia mengingat teknologi Indonesia yang tidak begitu maju. Indonesia juga memiliki pandangan terbuka terhadap segala kemungkinan yang dapat membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik sesuai dengan slogan politik luar negeri Indonesia saat itu. Selain itu, Jepang dapat memanfaatkan Indonesia untuk terus menjaga lingkungan dengan memberikan

sumbangan dana dan teknologi, dan di sisi lain Jepang bisa tidak terlalu peduli dengan lingkungan karena merasa sudah mengeluarkan dana untuk menjaga lingkungan. Seperti fenomena saat ini negara maju memberikan dana kepada negara berkembang untuk kepentingan keamanan lingkungan tetapi mereka sendiri tidak mau mengurus lingkungannya.

B. Perdagangan Internasional Indonesia-Jepang

Perdagangan internasional suatu kegiatan pertukaran barang dan jasa yang melintasi batas-batas teritorial suatu negara ke teritorial negara negara lain, hal ini merupakan bentuk paling tradisional dari kegiatan bisnis internasional dan telah ada sejak dulu sehingga membentuk sejarah dunia. Perdagangan Internasional yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa individu dengan individu, antara individu dengan negara atau negara dengan negara lain. Perdagangan internasional telah melahirkan pilar-pilar dalam skema IJEPA, yaitu Trade Facilitation, Liberalization, dan Cooperation (Belay Seyoum, 2009)

Dalam hubungan Internasional, perdagangan Internasional merupakan salah satu topik penting dalam disiplin ilmu Ekonomi Politik Internasional. Sejak muncul konsep negara-bangsa, aktivitas perdagangan sudah mewarnai interaksi antar negara. Robert Giplin mengatakan bahwa perdagangan dan perang selalu menjadi pusat evolusi hubungan internasional. Perdagangan telah menyebabkan perubahan-perubahan mendasar dalam hubungan antar bangsa. Ekonomi politik internasional pada intinya membahas tentang siapa mendapatkan apa dalam sistem ekonomi dan politik internasional (Jackson&Sorensen, 2005).

Dalam teori perdangan Internasional disebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor dapat dilihat dari sisi pemerintahan dan sisi penawaran ((Salvatore, 1997). Dari sisi permintaan,

ekspor dipengaruhi oleh harga ekspor, nilai tukar riil, pendapatan dunia dan kebijakan devaluasi. Sedangkan dari sisi penawaran ekspor dipengaruhi oleh harga ekspor, harga domestik, nilai riil, kapasitas produksi yang bisa diproksi melalui investasi, impor bahan baku, dan kebijakan deregulasi.

Melalui IJEPA Indonesia dan Jepang telah menjalin sebuah kerjasama Internasional khususnya ekspor ikan tuna Indonesia ke Jepang dan hal ini akan dilanjutkan dalam suatu perdagangan Internasional. Eksploitasi ikan tuna merupakan salah satu permasalahan yang timbul dari berlakunya kerjasama IJEPA. Namun, masi ada beberapa masalah lain yang mendorong agar kebijakan ini segera di evaluasi. Masalah tersebut diantara lain mengenai timpangnya perdagangan antara Indonesia dan Jepang, standarisasi produk barang atau jasa yang masuk ke jepang cukup sulit, terjadinya krisis di berbagai bidang, dan jadwal penurunan tarif yang tidak tetap waktu. Yang mana masalah-masalah ini kemudian berdampak pada dinamika hubungan Indonesia dan Jepang.

EPA merupakan sebuah kerangka kerjasama ekonomi yang berbasis *Free Trade Agreement* (FTA). FTA memiliki pengertian antara dua negara atau lebih melakukan perjanjian Internasional bagi penghapus tarif. Perjanjian Economy Partnership Agreement (EPA) adalah nama baru untuk persetujuan ekonomi seperti perdagangan barang dan jasa, investasi, dan pembelian oleh pemerintah (Government procurement).

Perjanjian kerjasama economic Indonesia-Japan mendapatkan kesempatan yang dimna jepang merupakan kerjasama yang komperehensif dan lebih memberikan peluang daripada kesepakatan dalam World Trade Organization (WTO) PLUS. Untuk mengakomodasi

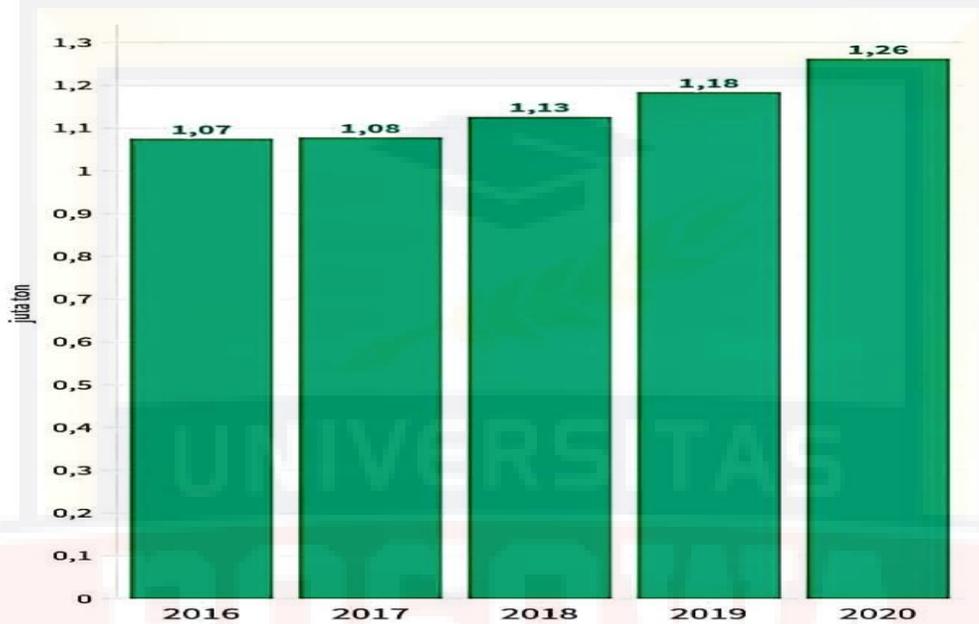
komprehensif dan memperlanca jalanny perundingan, maka mengelompokkan perundingan ke dalam 13 Expert Groups (EG), yaitu:

- a. Perdagangan barang (industri)
- b. Prosedur Bea Cukai
- c. Ketentuan Asal Barang (industri)
- d. Investasi
- e. Peningkatan Lingkungan bisnis dan Promosi Bisnis
- f. Perdagangan Servis (industri)
- g. Natural perdagangan perorangan
- h. Energi dan Sumber Daya mineral
- i. Intellectual Property Right (IPR)
- j. Kebijakan persaingan
- k. Kerjasama Teknis Pengembangan suatu Kapasitas
- l. Ketentuan umum
- m. Pengadaan Pemerintah.

Implementasi IJEPA di bidang perikanan khususnya untuk komoditas ikan tuna, awalnya ditandai dengan penurunan tarif bea masuk ke jepanh, yaitu sebesar 3,5% untuk ikan tuna segar 9,3% untuk ikan tuna kaleng. Penurunan tarif ini dapat meningkatkan daya saing ekspor perikanan. Hal tersebut terbukti pada volume dan nilai produksi ikan tuna yang semakin meningkatkan dari tahun ke tahun.

(Tabel 1.1). peningkatan ini di sertai pula dengan peningkatan volume ekspor ikan tuna Indonesia ke beberapa negara tujuan utama, seperti Jepang, Amerika Serikat, Eropa, dan Cina.

Tabel 1.1 Volume dan Nilai produksi Komoditas Tuna Indonesia 2015-2020.



Sumber: Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP)

Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) mencatat, volume ekspor produk perikanan dari Indonesia sebanyak 1,26 juta ton dengan nilai 5,2 juta miliar pada 2020. Ekspor produk perikanan menunjukkan tren positif sejak 2016. Jumlahnya pun tak terganggu meski pandemi covid-19 melanda tanah air pada tahun lalu. Rata-rata kenaikan volume ekspor produk perikanan sebesar 4,2% dalam lima tahun terakhir.

Nilai ekspor ikan tuna tersebut masih dapat ditingkatkan dengan jalan meningkatkan daya saing produk tuna Indonesia, khususnya tuna olahan. Untuk meningkatkan daya saing tuna olahan Indonesia di pasar dunia, maka perlu political will pemerintahan untuk mendukung industrialisasi tuna, sehingga daya saing tuna dapat ditingkatkan. Dan kemudian strategi kedua adalah mengembangkan produk baru strategi ini merupakan strategi agresif dan implementasinya

dengan memanfaatkan sumberdaya manusia dan prasarana penunjang yang dimiliki guna menghasilkan produk tuna yang mempunyai harga paling tinggi dan sangat disukai konsumen Jepang atau disukai oleh masyarakat Jepang.

Dwi dan Firman dan Made (2018:12) menjelaskan Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara produsen ikan tuna setelah Thailand di kawasan ASEAN, hal ini disebabkan adanya perbedaan tingkat eksploitasi baik dari segi jumlah maupun teknologi penggunaan alat tangkap.

Selain itu mengingat bahwa perairan Indonesia luas dan potensi lestari yang masih berada sangat jauh di atas hasil produksi tangkapan tuna saat ini, maka peluang untuk meningkatkan produksi masih besar dan berarti peluang untuk meningkatkan ekspor sebagai penambah devisa negara juga besar. Berikut ini adalah tabel ekspor ikan tuna menurut negara-negara tujuan utama.

Tabel 1.1 Ekspor Ikan Tongkol/Tuna Menurut Negara Tujuan Utama 2008-2015

Negara tujuan	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jepang	18,921.0	22,557.2	30,282.3	35,010.2	29,236.6	33,116.6	25,118.1	26,167.2
Hongkong	2,687.5	1,249.4	4,500.3	215.8	138.4	217.5	75.9	110.3
Taiwan	3,289.8	4,332.7	4,500.3	305.8	225.5	351.1	360.0	125.5
Thailand	28,887.4	24,140.7	9,083.5	12,824.8	42,974.2	44,777.9	47,920.3	34,868.8

Singapur	1,847.7	1,867.1	1,334.2	699.7	360.8	572.4	658.2	441.2
a								
Vietnam	7,671.8	5,035.1	3,042.6	2,675.9	3,320.0	2,678.5	118.1	70.6
Australia	129.2	179.5	193.3	130.8	91.5	127.1	118.1	70.6
Amerika Serikat	5,395.5	5,526.4	4,536.9	4,117.1	4,515.5	4,199.3	2,359. 9	1,477.2
Belanda	411.1	108.8	181.6	348.2	156.0	74.8	946.2	41.8
Belgia	208.6	100.1	257.3	58.5	10.0	209.4	41.0	25.7
Lainnya	13,756.2	11,259. 5	13,976. 7	15,398. 1	24,669. 3	26,022. 8	21,27 8.8	12,971. 4
Jumlah	83,205.8	76,356. 5	67,682. 5	71,784. 9	105,72 7.8	112,34 7.4	101,1 11.0	77,465. 3

Sumber : Badan Pusat Statistik 2015

Namun pembatasan sosial yang diberlakukan oleh beberapa negara, termasuk Indonesia, telah menyebabkan kesulitan logistik dalam perdagangan hasil laut, terutama yang terkait dengan transportasi dan pembatasan perbatasan. Industri tuna melaporkan bahwa pergerakan pelaut profesional (termasuk pengamat perikanan laut dan pelaut pelabuhan) telah dibatasi, mengakibatkan penggantian awak dan pemulangan pelaut.

Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah Jepang untuk melakukan lockdown kota Tokyo dan social distancing di wilayahnya juga yang menjadi dampak penurunan permintaan impor komoditas perikanan. Data International Trade Center (ITC 2020) menunjukkan bahwa pada periode Januari-Februari 2020 total nilai impor produk perikanan Jepang mencapai USD

1,95 Milyar atau jumlah ini dikatakan turun sebesar 17,85% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019. Sejak COVID, dua negara tujuan ekspor yakni Amerika dan Jepang memberlakukan lockdown hampir setahun. Tuna tidak bisa dikirim ke Amerika, begitu juga dengan Jepang. Selain tidak ada pesawat yang beroperasi, konsumsi masyarakat juga menurun sehingga nilai ekspor merosot hingga 50 persen. Ekspor baru kembali dibuka sejak akhir 2020.

Seiring dengan penurunan permintaan dan penurunan harga, produksi perikanan tangkap mengalami stagnasi atau penurunan secara substansial di beberapa negara. Hal tersebut tidak secara terus menerus berlangsung, dengan berjalannya waktu, penanganan dalam menangani covid-19 juga mengalami peningkatan sehingga di pertengahan tahun 2020 sampai saat ini, kegiatan ekspor ikan tuna ke Jepang mulai mengalami peningkatan setelah dilonggarkannya pembatasan kerja dengan syarat tetap mematuhi protokol kesehatan. Melihat mulai naiknya konsumsi masyarakat serta kembali dibukanya pasar global untuk memenuhi kebutuhan negara yang sudah lama tidak ada pemasukan dikarenakan penutupan pasar global. Menurut yang dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, ikan tuna sirip kuning asal Sulawesi Tengah siap di ekspor ke Jepang. Hal itu ia sampaikan setelah melakukan pemeriksaan produk perikanan terutama di Kabupaten Parigi Moutong di tengah berlangsungnya pandemi covid-19. Beliau juga mengatakan, walaupun pandemi covid-19 belum usai, bukan berarti hal ini otomatis menurunkan permintaan dunia akan komoditas perikanan Indonesia. Tercatat pengeksportan ikan tuna di Sulteng pada 12 Juni 2020 sejumlah 300kg yang dikirim melalui via udara.

Kondisi ditengah masa pandemi dari daerah lain Indonesia terkait dengan permintaan ekspor ikan tuna juga tidak kalah melaju naik. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), dari Januari hingga April 2021, ekspor komoditas kelautan dan perikanan nasional meningkat sebesar 4,15%. Total volume ekspor pada kuartal I tahun ini sebesar US\$1,75 miliar. Peningkatan ekspor

membawa surplus perdagangan kelautan dan perikanan menjadi US\$1,59 miliar, meningkat 3,26% dari tahun ke tahun. Bahkan, pada April 2021, nilai ekspor produk kelautan dan perikanan mencapai US\$488,6 juta, meningkat 11,6% dibandingkan April 2020. Sektor kelautan dan perikanan diharapkan menjadi pengungkit ekonomi di masa pandemi COVID-19. Dia melanjutkan, peningkatan ekspor kelautan dan perikanan serta surplus perdagangan akan membantu pencapaian tujuan ekspor produk kelautan dan perikanan sebesar US\$6,05 miliar pada tahun 2021. Tujuan KKP sendiri adalah untuk meningkatkan volume dan nilai ekspor sekitar US\$1 miliar dari tahun sebelumnya menjadi US\$6,05 miliar pada tahun 2021.



BAB IV

PEMBAHASAN

Bab empat dari penelitian akan membahas mengenai bagaimana strategi Indonesia dalam meningkatkan ekspor ikan tuna melalui Kerjasama Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement pada kurun waktu 2015-2020. Selain itu membahas dampak ekspor Tuna Indonesia terhadap perekonomian Indonesia tahun 2015-2020. Indonesia merupakan mitra penting bagi Jepang dalam kerjasama bilateral dikarenakan Indonesia merupakan negara yang telah menjalin hubungan bilateral dengan negara Jepang dalam berbagai sektor strategi. Salah satunya Indonesia dan Jepang membentuk suatu kesepakatan perdagangan bebas dalam bingkai kesepakatan kerjasama ekonomi secara bilateral yang pertama kali Indonesia lakukan dengan negara mitra adalah IJEPA (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement). Perjanjian tersebut disusun guna menghasilkan manfaat bagi kedua pihak secara fair, seimbang, dan terukur melalui liberalisasi akses pasar, fasilitasi, dan kerjasama melalui pengembangan kapasitas untuk sektor-sektor industri prioritas.

Strategi Indonesia dalam mengeksport ikan tuna ke Jepang ini merupakan salah satu mengembangkan pasar baru strategi ini merupakan strategi agresif dimana implementasinya adalah melakukan promosi yang gencar melalui pameran Internasional di Jepang dalam bentuk promosi dan pameran dagang. Sebagai besar produksi ikan tuna Indonesia di ekspor ke beberapa negara tujuan seperti Jepang, Uni Eropa dan Amerika. Permintaan tuna ke Jepang dan Amerika Serikat dari tahun ke tahun tidak pernah mengalami penurunan. Ekspor tuna memberikan nilai tambahan dan mendorong tumbuhnya industri pengolahan ikan didalam negeri, maka perlu dilakukan upaya meningkatkan nilai tambah ekspor ikan tuna. Dukungan kebijakan pemerintah

untuk mengembangkan industri pengolahan tuna ini sangat di perlukan sehingga ekspor tuna olahan akan meningkat dan pada akhirnya akan meningkatnya devisa negara.

Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif (James dan Robert,1986:419).

Suatu hubungan dalam kerjasama antar negara merupakan pertemuan bermacam-macam kepentingan nasional dari beberapa negara-negara yang bekerjasama dalam sifatnya yang tidak dapat dipenuhi oleh bangsanya sendiri. Sehingga kerjasama internasional dapat dilakukan secara bilateral, yaitu antara dua negara. Untuk itu maka hal ini yang dilakukan oleh Indonesia-Jepang dalam kerjasama ekonomi melalui IJEPA dalam pembangunan industri manufaktur di Indonesia dalam MIDEK. Dalam proses pelaksanaan Kerjasama Bilateral, menurut Spiegel menyatakan bahwa dapat ditemukan tiga motif, yaitu: memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Perjanjin tersebut disusun guna menghasilkan manfaat bagi kedua pihak secara fair, seimbang, dan terukur melalui liberalisasi akses pasar, fasilitasi, dan kerjasama melalui pengembangan kapasitas untuk sektor-sektor industri prioritas.

A. Strategi Indonesia dalam Meningkatkan Ekspor Ikan Tuna ke Jepang selama kurun waktu 2015-2020

Strategi Indonesia dalam mengeksport ikan tuna ke Jepang ini merupakan salah satu mengembangkan pasar baru strategi ini merupakan strategi agresif dimana implementasinya

adalah melakukan promosi yang gencar melalui pameran Internasional di Jepang dalam bentuk promosi dan pameran dagang. Sebagai besar produksi ikan tuna Indonesia di ekspor ke beberapa negara tujuan seperti Jepang, Uni Eropa dan Amerika. Permintaan tuna ke Jepang dan Amerika Serikat dari tahun ke tahun tidak pernah mengalami penurunan. Ekspor tuna memberikan nilai tambahan dan mendorong tumbuhnya industri pengolahan ikan didalam negeri, maka perlu dilakukan upaya meningkatkan nilai tambah ekspor ikan tuna. Dukungan kebijakan pemerintah untuk mengembangkan industri pengolahan tuna ini sangat di perlukan sehingga ekspor tuna olahan akan meningkat dan pada akhirnya akan meningkatnya devisa negara. Selain meningkatnya devisa di kedua negara, IJEPA ini juga menjalin hubungan kerjasama bilateral pada sektor ekonomi yang dimana kerjasama ini disepakati pada 20 Agustus 2007. Perjanjian tersebut mencapai kesepakatan tentang kerjasama ekonomi antara kedua negara dalam perdagangan barang dan jasa dan investasi. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan ekspor produk perikanan Indonesia khususnya perikanan Tuna. Adapun strategi tersebut meliputi:

a. Pemberian Izin

Produksi perikanan tuna Indonesia, dari tahun 2015 mencapai triliun III, atau mencapai 14,79 juta ton dengan kontribusi perikanan tangkap mencapai 4,72 juta ton. Produksi perikanan tangkap tersebut berasal dari alat tangkap seperti pukat cincin, Rawai tuna, pukat ikan. Adapun, nilai total ekspor perikanan hasil tangkapan Indonesia di tahun 2020 sebesar 5,20 triliun, volume ekspornya tercatat 1,26 juta ton.

Dominan kapal perikanan yang berasal dari izin pusat terbanyak, berada di wilayah pengolahan perikanan (WPP) yang berada di perairan samudra. Pemerintah Indonesia sudah

seharusnya menggunakan perhitungan potensi perikanan dan jumlah tangkap yang di perbolehkan sebagai rujukan dalam pemberian izin. Demikian juga dengan pemerintah daerah sudah seharusnya memberikan izin pada nelayan tangkap berdasarkan jangkauan pada penangkapan Ikan Tuna.

b. Mengembangkan Sistem Logistik Ikan Nasional

Pengembangan sistem logistik Ikan pada intinya, suatu jaringan pemasukan bahan baku yang di kembangkan secara nasional sistem ini dilakukan untuk mendukung industrialisasi perikanan. Pemerintah melalui kebijakannya sejak tahun 2015-2020 tidak hanya berfokus pada industri-industri berskala besar. Namun mengakomodasi dengan kegiatan industri skala kecil.

Sistem logistik ikan nasional adalah sistem manajemen rantai pemasok hasil iakn perikanan, serta informasi mulai dari perikananana, serta informasi mulai dari pengadaan, penyimpanan, transportasi sampai dengan distribusi, sebagai salah satu kesatuan dari kebijakan. Dalam hal ini ketersediaan bahan baku industri pengelolaan ikan dalam negari dan untuk memenuhi konsumsi ikan dalam egari, Mentri yang menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan mengembangkan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) sebagaimana pasal 2 ayat (3) meliputi:

- Pengembangan jaringan distribusi ikan yang menjangkau seluruh wilayah secara efisien;
- Pengelolaan sistem distribusi ikan yang dapat mempertahankan mutu dan keamanan hasil perikanan
- Pengembangan sarana dan prasarana distribusi ikan;
- Pengembangan kelembangaan distribusi ikan.

Saatnya para pelaku usaha perikanan memaksimalkan peluang ekspor yang kian terbuka. Selain makin diminati di pasar global, produk perikanan Indonesia bisa menikmati tarif 0 persen ke berbagai negara di dunia. Terlebih Pemerintah Indonesia telah menyelesaikan dan meratifikasi perjanjian perdagangan dengan beberapa negara. Antara lain seperti Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), dengan adanya perjanjian dagang tersebut, diharapkan peluang akses pasar produk perikanan semakin terbuka mengingat hambatan tarif semakin menurun bahkan dihapuskan.

Sebelumnya Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti juga pernah menyampaikan bahwa Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) telah memproyeksikan, pada tahun 2030 sebanyak 90 persen dari produksi ikan akan dikonsumsi sebagai pangan. Sementara konsumsi ikan akan meningkat di kawasan Asia, Eropa dan Amerika, sementara di Oseania akan tetap stabil dan menurun di Afrika serta konsumsi ikan di Tiongkok diproyeksikan sekitar 45 kilogram per kapita pada tahun 2030. Selain itu, diproyeksikan juga ekspor ikan konsumsi dunia pada tahun 2030 akan mencapai 44 juta ton. Dan sekitar 47 persen ekspor ikan konsumsi dunia akan berasal dari negara-negara Asia.

Nilai ekspor produk perikanan periode Januari-Maret 2022 mencapai 1,53 miliar dolar AS atau naik 21,62,persen dibanding periode yang sama tahun 2021. Negara tujuan ekspor utama produk Indonesia meliputi Amerika Serikat sebesar 727,27 juta dolar AS atau meningkat 29,60 % dibanding periode tahun sebelumnya, Tiongkok sebesar 214,39 juta dolar AS (meningkat 25,32 %).

Kemudian Jepang sebesar 151,62 juta dolar AS meningkat 10,08 %, ASEAN sebesar 151,26 juta dolar AS meningkat 12,18 %, dan Uni Eropa sebesar 78,17 juta dolar AS (meningkat 26,71 persen). Dari sisi komoditas, ekspor utama Indonesia meliputi Udang (40,64 % terhadap nilai ekspor total), Tuna-Cakalang-Tongkol (12,39 %), Rajungan-Kepiting (11,28 persen), Cumi-Sotong-Gurita (10,10 persen), Rumput Laut (7,47 %).

Salah satu bentuk kerjasama perdagangan bilateral yang dilakukan oleh Indonesia adalah Indonesia *Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA). IJEPA merupakan kesepakatan kerjasama ekonomi perdagangan bebas secara bilateral yang pertama kali dilakukan oleh Indonesia dengan negara mitra, Jepang.

Sejak adanya ekspor ikan tuna ke Jepang, ekspor ini terus memberikan kontribusi kepada perekonomian nelayan maupun perekonomian. Kegiatan ekspor ini memberikan keuntungan kepada kedua negara, dalam hal ini Jepang harus memenuhi pasar yang besar akan ikan tuna. Sementara laut Jepang sendiri relatif kurang menghasilkan ikan tuna sehingga harus di impor ke negara lain. Sementara Indonesia dengan lautan yang sangat dan hasil laut yang sangat melimpah, diminta untuk memanfaatkan hasil lautnya dengan baik. Meningkatnya ekspor ikan tuna Indonesia – Jepang tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam negeri tersebut khususnya untuk kedua negara.

Dalam perjanjian IJEPA, Indonesia maupun Jepang sama-sama menyepakati bidang-bidang perekonomian, yang berupa perdagangan barang dan jasa, investasi, hak kekayaan intelektual, serta sumberdaya energi dan mineral. Dengan berlakunya perjanjian IJEPA diharapkan akan menguntungkan Indonesia dalam membuka peluang pasar di kegiatan ekspor, sehingga Indonesia dapat sejajar dengan negara pesaing dipasar Jepang. Peningkatan ekspor Indonesia ke Jepang

yang terjadi tentu akan memberikan dampak peningkatan pada pendapatan nasional Indonesia, sehingga akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Adapun kelompok perundingan yang dilakukan dalam perjanjian perdagangan Indonesia-Jepang berupa; *Trade in Goods, Rules of Origin, Customs Procedures, Trade in Services, Investment, Movement of Natural Person, Government Procurement, Intellectual Property Right, Competition Policy, Energy an Mineral Resources, and Cooperation* (Ditjen KPI, 2015).

c. Mengembangkan Sumberdaya Manusia

Pemerintah mendorong usaha-usaha perikanan tangkap khususnya tuna, baik terhadap industri maupun terhadap pelaku industri untuk meningkatkan hasil tangkap dengan memanfaatkan berbagai macam teknologi tetap mampu memperhatikan lingkungan.

d. Pemberian Modal Usaha dan Dukungan terhadap Industri Perikanan

Peningkatan harga barang biaya penangkapan, biaya produksi merupakan masalah yang sering di jumpai pada jumpai pada industri perikanan baik itu, industri besar maupun industri kecil pada kurun waktu 2015-2020.

Situasi seperti ini berdampak di Indonesia pada saat pandemik dunia industri dan masyarakat nelayan kesulitan dalam permasalahan modal usaha.

Pemerintah melalui kementerian kelautan dan perikanan memberikan bantuan permodalan kepada seluruh kegiatan-kegiatan industri perikanan di Indonesia.

e. Mensosialisasikan Mutu Produk

Kualitas produk perikanan khususnya tuna yang akan di ekspor tentunya harus memiliki mutu dan kualitas yang baik. Dalam kurun waktu 2015-2020 pemerintah Jepang memberikan sanksi terhadap produk perikanan yang kurang baik dari Indonesia. Ini dapat dilihat dari jumlah nilai ekspor ikan tuna dari beberapa negara lainnya seperti, philipina, thailand, lebih besar dibandingkan dengan Indonesia.

Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan mutu dan kualitas perikanan tuna adalah mengsosialisasikan bagaimana cara menangani ikan yang baik sehingga dapat meningkatkan nilai. Salah satu program pemerintah dalam mengsosialisasikan mutu dan kualitas perikanan adalah melalui program coremap CTI di beberapa di beberapa daerah dengan potensi perikanan tuna yang di Indonesia.

f. Mengembangkan Pengelolaan Perikanan Berbasis WPP

Ada 4 provinsi yang memiliki hasil ekspor perikanan yang tinggi di Indonesia pada tahun 2015-2020 yaitu, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Lampung dan Sumatra Utara pemerintah memberikan rekomendasi terhadap provinsi lainnya yang memiliki potensi perikanan tuna yang cukup tinggi khususnya di Indonesia Timur.

g. Mengedepankan Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan

Pemanfaatan sumberdaya Ikan harus dengan ramah lingkungan atas dasar itu kaidah hukum internasional banyak di adopsi dalam hukum nasional dan harus di taati bersama.

Prinsip pengelolaan berkelanjutan itu bukan saja merusak lingkungan tapi juga bermanfaat secara sosial.

h. Hubungan dan Koordinasi dengan Pemasok Ikan Tuna untuk di Ekspor

Adanya kerjasama ini antara kebijakan Indonesia-Jepang yang makin erat dari sisi ekonomi dan itu merupakan salah satu keberhasilan dari Indonesia juga merupakan salah satu strategi yang menghubungkan Indonesia bekerjasama dengan negara-negara lainnya.

Hubungan perekonomian antar dua negara ini dinilai saling melengkapi atau komplementer. Contohnya Jepang mengekspor ke Indonesia berupa produk-produk otomotif yang sudah siap pakai, sementara Indonesia mengekspor ke Jepang bahan-bahan mentah seperti biji besi agar selanjutnya dapat diolah oleh Jepang. IJEPA memberikan keleluasaan kedua negara untuk melakukan kerja sama membangun perekonomian kedua negara dan mengurangi hambatan-hambatan dengan adanya hak-hak khusus pada kesepakatan yang dapat memperlancar berbagai aktivitas ekonomi. Perjanjian kerja sama ekonomi IJEPA baru mulai berlaku efektif mulai 1 Juli 2008 dan tiap lima tahun akan dilakukan peninjauan ulang. Untuk memperlancar pemberlakuan kesepakatan ini maka dibentuk juga komite bersama yang mana tersusun dari wakil pemerintah masing-masing yang nantinya bertugas untuk melakukan *review* dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan operasional jalannya kerjasama.

IJEPA (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement) merupakan sebuah kesepakatan mengenai suatu kemitraan ekonomi anatar Indonesia dan Jepang yang dilandasi dengan prinsip EPA (Economic Partnership Agreement).

Perekonomian diberbagai negara dunia semakin terintegrasi akibat dari adanya globalisasi yang semakin mempermudah arus perpindahan teknologi, informasi, barang maupun jasa. Hal inilah yang mendasari bahwa perdagangan internasional telah memegang peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara didunia, salah satunya Indonesia. Perdagangan internasional banyak memberikan manfaat bagi suatu negara dengan cara

memproduksi produk yang memiliki keunggulan komparatif yang dimiliki oleh suatu negara, dengan demikian negara tersebut akan memperoleh pasar yang lebih luas. Namun, perdagangan internasional juga akan berdampak negatif pada pasar domestik. Karena besarnya peluang masuknya produk dari luar negeri yang lebih murah dan juga berkualitas.

Setiap negara memiliki strategi dalam menekankan persaingan antar negara untuk mempertahankan atau meningkatkan daya saing produk yang dimilikinya dalam pasar internasional. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia kian menerapkan strategi diplomasi maupun mengadopsi kebijakan perdagangan bebas, baik bilateral ataupun multilateral. Menurut Nopirin (2009:3) suatu negara yang terlibat dalam perjanjian akan dapat meningkatkan pendapatan nasional dan memperluas pasar. Selain itu, suatu negara yang terlibat kerjasama tentu akan dipengaruhi oleh mitra dagang (Todaro, 1994). Perjanjian kerjasama yang dilakukan dengan mitra dagang akan memberikan keuntungan bagi negara-negara yang terlibat dalam suatu perdagangan.

Salah satu bentuk kerjasama perdagangan bilateral yang dilakukan oleh Indonesia adalah Indonesia *Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA). IJEPA merupakan kesepakatan kerjasama ekonomi perdagangan bebas secara bilateral yang pertama kali dilakukan oleh Indonesia dengan negara mitra, Jepang.

Sejak adanya ekspor ikan tuna ke Jepang, ekspor ini terus memberikan kontribusi kepada perekonomian nelayan maupun perekonomian. Kegiatan ekspor ini memberikan keuntungan kepada kedua negara, dalam hal ini Jepang harus memenuhi pasar yang besar akan ikan tuna. Sementara laut Jepang sendiri relatif kurang menghasilkan ikan tuna sehingga harus di impor ke negara lain. Sementara Indonesia dengan lautan yang sangat dan hasil laut yang sangat

melimpah, diminta untuk memanfaatkan hasil lautnya dengan baik. Meningkatnya ekspor ikan tuna Indonesia – Jepang tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam negeri tersebut khususnya untuk kedua negara.

B. Dampak Ekspor Tuna Indonesia terhadap Perekonomian Indonesia kurun waktu 2015-2020

Sebagai salah satu negara pengekspor tuna dunia, Indonesia memandang bahwa perdagangan bebas menjadi peluang yang sangat terbuka untuk kegiatan ekspor perikanan, di lain sisi adanya perdagangan bebas juga memberikan tantangan bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing agar dapat menghasilkan produk yang kompetitif di pasar internasional.

Kebijakan kerjasama yang dilakukan oleh kedua pemerintah di tujuakan untuk mendorong peningkatan ekspor barang dan jasa dan peninngkatan daya saing. Program IJEPA ini memiliki sasaran agar meningkatnya ekspor non migas danmenjadi salah satu sumber pertumbuhan ernasional serta penyederhanaan perjanjian perdagangan luar negeri.

Suatu kepentingan muncul dari kebutuhan suatu negara, yang dapat dilihat dari kondisi internalnya baik dalam bidang politik, ekonomi, militer, dan social budaya. Kepentingan nasional juga didasari oleh power yang ingin diciptakan oleh suatu negara yang dapat memberikan dampak bagi perkembangan negara tersebut agar mendapatkan pengakuan dari negara-negara di seluruh dunia. Peran suatu negara dalam memenuhi kepentingan nasionalnya tidak dipungkiri menjadi kacamata bagi masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan dari kebijakan luar negerinya. Oleh karena itu, kepentingan nasional secara konseptual dilakukan untuk memberikan penjelasan mengani perilaku politik luar negeri suatu negara. (P. Anthonius Sitepu, 2016).

Faktor yang dapat mempengaruhi ekspor ikan tuna di Indonesia salah satunya adalah nilai tukar, yang dimaksud dengan nilai tukar adalah kurs valuta asing atau kurs mata uang asing menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dengan mata uang negara lain, kurs valuta asing juga dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing, semakin tinggi nilai mata uang asing maka akan semakin tinggi uang yang harus dibayarkan.

Setiap negara memiliki sumber daya alam, iklim maupun keadaan geografis yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut menyebabkan adanya perbedaan kualitas maupun kuantitas produk serta komoditas yang dihasilkan. Secara langsung ataupun tidak langsung dengan adanya perbedaan tersebut akan mendorong terjadinya perbedaan persediaan barang dan jasa antar negara. Sehingga negaranegara di dunia perlu menjalin hubungan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri di tiap-tiap negara tersebut Setiap negara memiliki sumber daya alam, iklim maupun keadaan geografis yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut menyebabkan adanya perbedaan kualitas maupun kuantitas produk serta komoditas yang dihasilkan. Secara langsung ataupun tidak langsung dengan adanya perbedaan tersebut akan mendorong terjadinya perbedaan persediaan barang dan jasa antar negara. Sehingga negaranegara di dunia perlu menjalin hubungan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri di tiap-tiap negara tersebut Setiap negara memiliki sumber daya alam, iklim maupun keadaan geografis yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut menyebabkan adanya perbedaan kualitas maupun kuantitas produk serta komoditas yang dihasilkan. Secara langsung ataupun tidak langsung dengan adanya perbedaan tersebut akan mendorong terjadinya perbedaan persediaan barang dan jasa antar negara. Sehingga

negaranegara di dunia perlu menjalin hubungan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri di tiap-tiap negara tersebut. Salah satu cara untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi adalah dengan melakukan perdagangan internasional.



BAB V

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

1. IJEPA adalah bentuk perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Jepang yang ditandatangani dan di bentuk pada tanggal 20 Agustus 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Shinjo Abe. IJEPA mulai aktif diimplementasikan pada 1 Juli 2008. Kerjasama Bilateral antara dua negara memiliki prinsip yang saling menguntungkan, saling menghargai, dan saling menghormati satu dengan yang lain dalam rangka pengembalian kesepakatan dan keputusan. Kesepakatan ini merupakan perjanjian perdagangan bebas bilateral pertama yang dilakukan Indonesia, dan yang paling komprehensif. Dalam program Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) hubungan bilateral kedua negara semakin baik dengan dilakukannya perdagangan ekspor ikan tuna.
2. Ekspor tuna memberikan nilai tambahan dan mendorong tumbuhnya industri pengolahan ikan didalam negeri, maka perlu dilakukan upaya meningkatkan nilai tambah ekspor ikan tuna. Dukungan kebijakan pemerintah untuk mengembangkan industri pengolahan tuna ini sangat di perlukan sehingga ekspor tuna olahan akan meningkat dan pada akhirnya akan meningkatnya devisa negara. Selain meningkatnya devisa di kedua negara, IJEPA ini juga menjalin hubungan kerjasama bilateral pada sektor ekonomi yang dimana kerjasama ini disepakati pada 20 Agustus 2007. Perjanjian tersebut mencapai kesepakatan tentang kerjasama ekonomi antara kedua negara dalam perdagangan barang dan jasa dan investasi. Dalam kerjasama bilateral IJEPA, Indonesia mengadopsi strategi

kepentingan nasional yang bertujuan untuk mendorong utama pertumbuhan ekonomi di negara masing-masing.

3. Melalui IJEPA Jepang berkepentingan negaranya dapat mengamankan investasi dan memperluas akses pasar bagi produknya secara politis, IJEPA membuat Indonesia mempunyai kedudukan yang setara dengan negara lain yang sudah terlebih dahulu menjalin kerjasama bilateral dengan Jepang dimana Indonesia menambah akses pasar barang dan jasa sedangkan Jepang memperluas produknya. Indonesia dan Jepang harus bisa memanfaatkan perjanjian kerjasama IJEPA ini untuk pertumbuhan perekonomian masing-masing negara sehingga bisa mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang.

B. SARAN

1. Dengan adanya IJEPA, Indonesia-Japan dapat mempertahankan dan mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang ini sebagai pertumbuhan perekonomian masing-masing negara.
2. Perlunya lebih di tinggarkannya sosialisasi kepada pelaku usaha baik pelaku usaha dalam perdagangan kerkait kerjasama IJEPA, khususnya dalam pelaksanaan aturan-aturan dan prosedur dalam ekspor impor dan bea cukai yang telah disepakati oleh kedua negara melalui kerangka IJEPA. Agar pelaku usaha dapat melakukan prosedur dan aturan-aturan tersebut sebelum melakukan ekspor industrinya ke Jepang.

Daftar Pustaka

Dobson, Hugo. 2001. *Japan's International Relations*. New York: Routledge.

Drs Supendi Haryadhi. 1990. "Ilmu Pengetahuan Sosial Geografi Kependudukan SMP Kelas 3.

Ditjen Perikanan Tangkap KKP (2012 dan 2013), www.statistik.kkp.go.id. Di akses pada tanggal 2 April 2022.

Ditjen Perikanan Tangkap KKP (2012 dan 2013), www.statistik.kkp.go.id. Di akses pada tanggal 2 April 2022.

Frank, Flo & Anne Smith. 2002. "The Partnership Handbook, Ministry of Publik and

Fransiska Amadea. (2019). Faktor Penghambat Peningkatan Investasi Jepang di Indonesia dalam Kerangka Kerja IJEPA 2008-2018. Universitas Katolik Parahyangan.

Holsti, K. J, 1988 "Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisa, Jilid II, terjemahan M. Tahrir Azahari. Jakarta: Erlangga.

Holsti, K.J.. 1992. Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis. Bandung: Bina Cipta.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2018), <https://kemenlu.go.id>. Di akses pada tanggal 1 Desember 2021

Krisna, Didi. (1993). *Kamus Politik Internasional*. Jakarta: Grasindo

KJ Holsti (1967). Dalam *internasional politis: A framework for analisis*.

Larasati, Syntia D. (2015). Dinamika Hubungan Indonesia dan Jepang dalam Indonesia Japan Economic Partnership Agreement Studi Kasus: Evaluasi Kebijakan Terhadap

Eksplorasi Ikan Tuna di Wilayah Perairan Indonesia. *Journal of International Relations*, Vol 1, No 2, 70-78. Universitas Diponegoro

Nelly Yuswani, Kerjasama Indonesia – Jepang Melalui Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dalam Perdagangan Ekspor Ikan Tuna (2012- 2017)

Nye, 2004: 11 dalam “Soft Power dan Strategi Diplomasi Indonesia” oleh Pribadi Sutiono

Plano, C. Jack dan Olton, Roy. (1999). Kamus Hubungan Internasional. Bandung: Abardin.

Robert Jackson Dan George Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar.2009)

Yusdja, Y.2004. Paradigma Keunggulan Kooperatif: Membangun Sistem Perdagangan Dunia yang lain. ICASERD Working Paper No. 62. Pusat Penelitian. Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.